

SENIN, 9 MARET 2026

FOKUS: SEKOLAH SEPANJANG HARI (SSH)



Ø KEGIATAN UTAMA

Pada bulan Maret 2026, Pokja Papua Cerdas BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan rapat **Dengar Pendapat (RDP)** dilanjutkan dengan koordinasi bersama **Tim Sekolah Sepanjang Hari (SSH)** Universitas Papua (**UNIPA**) Manokwari yang **dipimpin oleh Dr. Agus Somule** dan didampingi anggotak Teknis **Dr. Hengky Wambrau**.

Kegiatan RDP dilaksanakan di **Ruang Pertemuan BP3OKP RI Lt. 3 GKN Papua Barat** pada **Senin, 9 Maret 2026**. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas Pokja Papua Cerdas **BP3OKP RI** Perwakilan provinsi **Papua Barat** dengan Universitas Papua dalam mendukung **implementasi program SSH** sebagai salah satu **strategi peningkatan kualitas pendidikan** di wilayah Papua Barat, khususnya pada daerah pinggiran dan tertinggal di Wilayah Provinsi Papua Barat.



Foto 1: RDP Group



Foto 2: Meeting Wide View



Foto 3: Dr. Somule & Team Coordination

PAPARAN KOMPREHENSIF: HASIL PEMBAHASAN & STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PAPUA

HASIL PEMBAHASAN & KONSEP SSH

I. HASIL PEMBAHASAN

Dr. Agus Somule & Dr. Hengky Wambrau.

- SSH sebagai respon rendahnya partizipasi sekolah anak asli papua di wilayah pinggiran.
- Pendekstan pembelajaran fleksibel, kontekstual Papua.

STRATEGI IMPLEMENTASI



Integrasi pembelajaran formal & non-formal



Berkasis komunitas & budaya lokal



Optimalisasi guru lokal



Optimalisasi guru lokal



Kolaborasi PEMDA & mitra

SASARAN UTAMA SSH

- Meningkatkan partisipasi sekolah
- Mengurangi angka putus sekolah
- Meningkatkan literasi & numerasi
- Memperluas akses pendidikan di wilayah pinggiran

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DI 7 KABUPATEN PAPUA BARAT

Berdasarkan hasil diskusi di 7 kabupaten:

- Keterbatasan infrastruktur (ruang belajar, listrik, internet)
- Distribusi & ketersediaan guru tak merata
- Rendahnya partisipasi masyarakat
- Kondisi geografis sulit dijangkau
- Keterbatasan pembiayaan berkelanjutan
- Koordinasi lintas sektor tak optimal
- Data tak terintegrasi



REKOMENDASI STRATEGIS

III. REKOMENDASI STRATEGIS



Penguatan Kebijakan Daerah
Integrasi RPJMD & program prioritas



Pilot Project SSH
Implementasi di sekolah percontohan



Kemitraan Multipihak
PEMDA, BP30KP RI, UNIPA, stakeholder



Penguatan SDM Guru
Pelatihan & rekrutmen guru lokal



Penguatan Infrastruktur
Fasilitas pendukung pembelajaran



Pendanaan Berkelanjutan
Sinergi APBN, APBD, mitra



Monitoring & Evaluasi
Sistem evaluasi berbasis data

INDIKATOR & TARGET

IV. INDIKATOR SASARAN DAN TARGET

INDIKATOR UTAMA

- ↑ Angka Partisipasi Sekolah (APS) meningkat
- ↓ Angka Putus Sekolah menurun
- ↑ Kehadiran siswa meningkat
- ↑ Capaian literasi & numerasi meningkat
- ↑ Jumlah sekolah SSH meningkat
- ↑ Jumlah guru terlatih meningkat

TARGET TAHUNAN

TAHUN 2026

- Pilot SSH di 7 kabupaten
- Tim koordinasi provinsi/kabupaten terbentuk
- 30-46% sekolah sasaran adopsi
- Peningkatan swal APS

TAHUN 2027

- 60-75% sekolah sasaran SSH
- Penurunan signifikan putus sekolah
- Sistem SSH terstandarisasi
- Peningkatan signifikan literasi/numerasi



POKJA PAPUA CERDAS

BPP PAPUA BARAT

Sekolah Sepanjang Hari (SSH) Papua Barat - Model Campus

TERIMA KASIH



SSH PAPUA BARAT
- SEKOLAH SEPANJANG HARI

LAPORAN BULANAN KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF

Periode Maret 2026



KEGIATAN STRATEGIS PAPUA PRODUKTIF

Audiensi Bupati Teluk Bintuni & Balai PUPR Papua

Hari/Tanggal : **Senin, 02 Maret 2026**

Tempat : **Aston Niu Hotel, Manokwari**

PESERTA

- Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat
- Bupati Teluk Bintuni (Yohanis Manibuy, S.E., M.H.)
- Kepala Balai Penataan Bangunan & Prasarana Papua Barat
- Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat
- Kepala Balai Penyediaan Perumahan Papua Barat
- Dinas PUPR Provinsi Papua Barat
- Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni

TUJUAN KEGIATAN

Sinkronisasi Program Pembangunan di Kab. Teluk Bintuni — mensinergikan capaian program infrastruktur daerah meliputi Jalan, Perumahan, Irigasi, Bina Marga, Preservasi Wilayah, Tata Ruang, dan Infrastruktur Wilayah.

HASIL KEGIATAN

Pertemuan membahas Percepatan pembangunan strategis di Kabupaten Teluk Bintuni. Bupati memaparkan potensi daerah dan kebutuhan infrastruktur. Sinkronisasi program: SPAM, Rumah Layak Huni, serta Konektifitas pegunungan Muskona, Pesisir Teluk Bintuni dan Dataran Beimes.

REKOMENDASI

Percepatan Infrastruktur Teluk Bintuni

Tindaklanjuti hasil audiensi dengan menyusun proposal teknis bersama Balai PUPR untuk program jalan, perumahan, dan SPAM Bintuni. BPP Papua Barat mengkoordinasikan surat resmi kepada BBPJN, BP2P, dan BWS.

→ Susun surat permohonan teknis → Rapat lanjutan lintas Balai PUPR → Masukkan dalam RAPP 2026.



Hari/Tanggal: Selasa 03 Maret 2026

Tempat: Kantor BPP Lantai III, GKN Manokwari

PESERTA

- BP3OKP Perwakilan Papua Barat
- Ketua LPMS — Sam Sudin Bau
- Sekretaris LPMS — Susran
- Bendahara LPMS
- Anggota Delegasi LPMS
- Pendamping Advokasi
- Perwakilan komunitas dari Bintuni

TUJUAN KEGIATAN

Melanjutkan diskusi antara BP3OKP dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suku Sebiar (LPMS) terkait hak masyarakat atas kompensasi sumber daya gas di wilayah mereka berdasarkan kerangka hukum yang kuat.

HASIL KEGIATAN

LPMS memaparkan ketidaksesuaian kompensasi: dari 15 sumur yang ada, baru 6 dibayar (Rp60 M); 9 sumur belum dibayar. Produksi gas 14,3 ton/tahun \approx Rp77,4 T. Teridentifikasi 27 masalah spesifik. BPP akan koordinasi dengan Gubernur & mengundang ESDM ke rapat lanjutan.

TINDAK LANJUT

- Terjalin koordinasi awal BPP–LPMS sebagai langkah advokasi terstruktur
- Teridentifikasi 27 masalah kompensasi & tata kelola untuk ditindaklanjuti
- BP3OKP Provinsi Papua Barat melalui POKJA Papua Produktif akan melakukan pertemuan lanjutan melibatkan ESDM & Kantor Gubernur

REKOMENDASI

Penyelesaian Hak Kompensasi Gas Suku Sebiar (9 Sumur Belum Dibayar)

Fasilitasi rapat koordinasi melibatkan Gubernur Papua Barat, ESDM, dan SKK Migas untuk menyelesaikan kompensasi 9 sumur yang belum dibayar dari total 15 sumur. Dorong dasar hukum formal pengganti Pergub No. 25/2023.

→ Koordinasi dengan Gubernur /Bupati Teluk Bintuni → Undang ESDM & SKK Migas → Dokumentasikan 27 masalah LPMS.



Hari/Tanggal: Selasa-Sabtu, 05–07 Maret 2026

Tempat: Swiss-Belhotel Cendrawasih, Biak Numfor

PESERTA

- Anggota BP3OKP se-Papua & Pokja BP3OKP se-Papua
- Sekretariat BPP Jayapura & Manokwari
- Perwakilan Sek. Wakil Presiden RI
- Bappenas
- Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan

TUJUAN KEGIATAN

Menindaklanjuti ditetapkannya RAPPP sesuai Perpres No. 102 Tahun 2025, meningkatkan pemahaman pokja tentang implementasi RAPPP 2025–2029, serta memperkuat akuntabilitas, transparansi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

HASIL KEGIATAN

Rakor membahas sinkronisasi perencanaan daerah dan evaluasi penyerapan anggaran otonomi khusus di 6 provinsi Papua. Pemda Biak Numfor mendapat apresiasi Kemenku atas pengelolaan keuangan daerah.

TINDAK LANJUT

- Mendatanginya Fakta Integritas seluruh Anggota Pokja BP3OKP se-Tanah Papua
- Terselaraskannya RAPPP dengan rencana kerja pokja
- Penguatan akuntabilitas & transparansi pokja
- Peningkatan pemahaman implementasi RAPPP 2025–2029



KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Papua Barat 2027



PESERTA

- Gubernur Papua Barat
- Kepala Bappeda Provinsi Papua Barats
- Anggota DPRD Provinsi Papua Barat
- Rektor universitas & institusi akademik
- BP3OKP: Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, POLHUKAM
- LSM, organisasi perempuan, OPD Provinsi

Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2026, bertempat di Vita Hotel-Manokwari. Dengan tujuan Mengacu Permendagri No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah — menyelenggarakan konsultasi publik RKPD 2027 untuk menyerap masukan pemangku kepentingan dan memastikan keselarasan program dengan RIPPP.

Tindak Lanjut

- Teridentifikasi tantangan & solusi 3 pilar: Papua Sehat, Cerdas, Produktif
- Disepakati pendekatan kolaboratif lintas OPD sebagai kerangka koordinasi
- Rekomendasi SMK Negeri Pariwisata sebagai solusi pendidikan strategis
- BPP dorong konsistensi alokasi anggaran kesehatan minimum 20%

Rekomendasi

- Memastikan program tiga pilar masuk dalam RKPD 2027. Dorong konsultasi alokasi anggaran sebagai solusi pendidikan vokasi strategis daerah.

FGD Penyaluran Dana Desa TA 2026 & Diseminasi KFR Papua Barat 2025



PESERTA

- DJPK
- BPP Papua Barat
- BPP Papua Barat Daya
- Perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota

Hari Rabu Tanggal 10 Maret 2026, bertempat di Kantor BPP Lantai III, GKN Manokwari, Dengan tujuan Sosialisasi PMK No. 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa 2026 dan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Papua Barat Tahun 2025, termasuk perubahan klasifikasi Dana Desa baru (Reguler & KDMP).

HASIL KEGIATAN

Dana Desa 2026 berubah klasifikasi: Reguler & KDMP (ganti Earmarked/Non-Earmarked). Kinerja fiskal: Papua Barat tumbuh 4,73%, Papua Barat Daya 4,9%. Realisasi Dana Desa 2025 hanya 77,5% — terendah. Teridentifikasi isu: mismatch data kecamatan, keterlambatan verifikasi, nama desa tidak konsisten.

KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA

Audiensi Bersama UNIPA (Universitas Papua)



PESERTA

- BP3OKP Perwakilan Papua Barat
- Perwakilan UNIPA (Universitas Papua)

Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026, bertempat di Kantor BPP Lantai III, GKN Manokwari. Audiensi antara BP3OKP Papua Barat dengan Universitas Papua (UNIPA) dalam rangka penguatan kolaborasi pembangunan SDM dan implementasi program strategis Papua.

Pertemuan membahas penguatan peran UNIPA sebagai Perguruan Tinggi Pembina bagi Akademi Komunitas di Papua Barat Daya, serta koordinasi teknis program SSH (Sekolah Sepanjang Hari) dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

CAPAIAN

- Terbangunnya sinergi BP3OKP–UNIPA dalam pendampingan Akademi Komunitas
- Koordinasi lanjut program SSH & penjaminan mutu pendidikan vokasi Papua

Audiensi Kakanwil DJPb & Mata Garuda Papua Barat



PESERTA

- Kakanwil DJPb Papua Barat
- BP3OKP Perwakilan Papua Barat
- Pengurus Mata Garuda Wilayah Papua Barat (LPDP Alumni)

Hari Rabu Tanggal 11 Maret 2026, bertempat GKN Lantai II Manokwari, Dengan tujuan Memperkenalkan kepengurusan Mata Garuda Wilayah Papua Barat dan mendiskusikan peluang kolaborasi strategis dalam mendukung Misi Papua Cerdas: penguatan SDM, riset kebijakan, inovasi pembangunan, dan perluasan

CAPAIAN

- Terjalin komunikasi resmi Mata Garuda Papua Barat – BPP – DJPb
- Terpetakan peluang kolaborasi riset kebijakan & penguatan SDM OAP
- Rencana tindak lanjut kolaborasi dalam kerangka Papua Cerdas – RAPPP



BADAN PENGARAH PAPUA

Laporan Kegiatan Papua Sehat BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat MARET 2026



2 Maret 2026

Audiensi

Aston Niu Hotel, Manokwari

TUJUAN KEGIATAN

Sinkronisasi Program Pembangunan di Kab. Teluk Bintuni — mensinergikan capaian program infrastruktur daerah meliputi Jalan, Perumahan, Irigasi, Bina Marga, Preservasi Wilayah, Tata Ruang, dan Infrastruktur Wilayah.

PESERTA KEGIATAN

- Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat
- Bupati Teluk Bintuni (Yohanis Manibuy, S.E., M.H.)
- Kepala Balai Penataan Bangunan & Prasarana Papua Barat
- Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat
- Kepala Balai Penyediaan Perumahan Papua Barat
- Dinas PUPR Provinsi Papua Barat
- Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni

HASIL KEGIATAN

Pertemuan membahas percepatan pembangunan strategis di Teluk Bintuni. Bupati memaparkan potensi daerah dan kebutuhan infrastruktur. Disinkronkan program: SPAM, Rumah Layak Huni, Infrastruktur Jalan, serta konektivitas Pegunungan Moskona, Pesisir Teluk Bintuni, dan Dataran Beimes.



CAPAIAN

- Teridentifikasi program prioritas infrastruktur Teluk Bintuni
- Disepakati penyusunan surat permohonan/proposal teknis ke kementerian
- Dorongan pembangunan pelebaran jalan dua jalur Kota Bintuni
- Komitmen sinergi Pemda–Balai PUPR–BPP Papua Barat

3 Maret 2026

Rapat

Kantor BPP Lantai III, GKN Manokwari

TUJUAN KEGIATAN

Melanjutkan diskusi antara BP3OKP dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suku Sebiar (LPMS) terkait hak masyarakat atas kompensasi sumber daya gas di wilayah mereka berdasarkan kerangka hukum yang kuat.

PESERTA KEGIATAN

- BP3OKP Perwakilan Papua Barat
- Ketua LPMS — Sam Sudin Bau
- Sekretaris LPMS — Susran
- Bendahara LPMS
- Anggota Delegasi LPMS
- Pendamping Advokasi
- Perwakilan komunitas dari Bintuni

HASIL KEGIATAN

LPMS memaparkan ketidaksesuaian kompensasi: dari 15 sumur yang ada, baru 6 dibayar (Rp60 M); 9 sumur belum dibayar. Produksi gas 14,3 ton/tahun \approx Rp77,4 T. Teridentifikasi 27 masalah spesifik. BPP akan koordinasi dengan Gubernur & mengundang ESDM ke rapat lanjutan.



Tindak-lanjut

- Terjalin koordinasi awal BPP–LPMS sebagai langkah advokasi terstruktur
- Teridentifikasi 27 masalah kompensasi & tata kelola untuk ditindaklanjuti
- BP3OKP Provinsi Papua Barat melalui POKJA Papua Produktif akan melakukan pertemuan lanjutan melibatkan ESDM & Kantor Gubernur

03

Rakor Sinkronisasi RAPPP

5 – 7 Maret 2026 | Swiss-Belhotel, Biak Numfor

5–7 Maret 2026

Rakor

Swiss-Belhotel Cendrawasih, Biak Numfor

TUJUAN KEGIATAN

Menindaklanjuti ditetapkannya RAPPP sesuai Perpres No. 102 Tahun 2025, meningkatkan pemahaman pokja tentang implementasi RAPPP 2025–2029, serta memperkuat akuntabilitas, transparansi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

PESERTA KEGIATAN

- Anggota BP3OKP se-Papua & Pokja BP3OKP se-Papua
- Sekretariat BPP Jayapura & Manokwari
- Perwakilan Sek. Wakil Presiden RI
- Bappenas
- Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan

HASIL KEGIATAN

Rakor membahas sinkronisasi perencanaan daerah dan evaluasi penyerapan anggaran otonomi khusus di 6 provinsi Papua. Pemda Biak Numfor mendapat apresiasi Kemenku atas pengelolaan keuangan daerah.



Tindak Lanjut

- Ditandatanganinya Fakta Integritas seluruh Anggota Pokja BP3OKP se-Tanah Papua
- Terselaraskannya RAPPP dengan rencana kerja pokja
- Penguatan akuntabilitas & transparansi pokja
- Peningkatan pemahaman implementasi RAPPP 2025–2029

9 Maret 2026

Forum

Vitta Hotel, Manokwari

TUJUAN KEGIATAN

Mengacu Permendagri No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah — menyelenggarakan konsultasi publik RKPD 2027 untuk menyerap masukan pemangku kepentingan dan memastikan keselarasan program dengan RIPP.

PESERTA KEGIATAN

- Gubernur Papua Barat
- Kepala Bappeda Provinsi Papua Barats
- Anggota DPRD Provinsi Papua Barat
- Rektor universitas & institusi akademik
- BP3OKP: Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, POLHUKAM
- LSM, organisasi perempuan, OPD Provinsi

HASIL KEGIATAN

Gubernur paparkan 3 program prioritas: Papua Barat Cerdas, Sehat, Produktif. Bappeda paparkan draf RKPD 2027: 8 isu strategis, 7 prioritas, 20 program prioritas. Kemiskinan turun dari 20,66% → 19,58% (melampaui target). Pokja BPP soroti layanan kesehatan, guru, dan Dana Otsus. BP3OKP Papua Barat Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor dalam Pembangunan Papua Barat Dalam forum konsultasi publik, BP3OKP Papua Barat melalui perwakilannya menegaskan beberapa poin penting terkait arah pembangunan daerah. Ismail Sirfeffa dari BP3OKP menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi BP3OKP sejatinya hanya mencakup pengarah, namun demikian ia menekankan bahwa hingga kini belum terdapat kerangka dasar hukum yang memadai terkait PP 106 dan PP 102. Ia juga menggarisbawahi bahwa hakikat pembangunan harus dimaknai secara totalitas dan inklusif, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam setiap proses konsultasi publik dinilai sangat penting. Di bidang kesehatan, Muga Romanus dari BP3OKP POKJA Papua Sehat mengungkapkan temuan di lapangan yang cukup memprihatinkan. Ia menyebutkan bahwa layanan kesehatan di Papua Barat terdiri dari dua komponen, yakni pemberi dan penerima layanan, namun sisi pemberi layanan dinilai belum berjalan secara maksimal. Banyak puskesmas yang tidak memiliki tenaga kesehatan, bahkan terdapat puskesmas di Tahota yang tidak memiliki akses air bersih. Romanus menekankan bahwa anggaran tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen, melainkan harus terealisasi nyata di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa keberpihakan kepada OAP saat ini masih lemah, sehingga akses pelayanan di daerah 3T perlu diperkuat, termasuk melalui implementasi program pelayanan kesehatan bergerak.


Tindak Lanjut

- Teridentifikasi tantangan & solusi 3 pilar: Papua Sehat, Cerdas, Produktif
- Disepakati pendekatan kolaboratif lintas OPD sebagai kerangka koordinasi
- Rekomendasi SMK Negeri Pariwisata sebagai solusi pendidikan strategis
- BPP dorong konsistensi alokasi anggaran kesehatan minimum 20%



 10 Maret 2026

FGD

 Kantor BPP Lantai III, GKN Manokwari

TUJUAN KEGIATAN

Sosialisasi PMK No. 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa 2026 dan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Papua Barat Tahun 2025, termasuk perubahan klasifikasi Dana Desa baru (Reguler & KDMP).

PESERTA KEGIATAN

- DJPK
- BPP Papua Barat
- BPP Papua Barat Daya
- Perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota


HASIL KEGIATAN

Dana Desa 2026 berubah klasifikasi: Reguler & KDMP (gantikan Earmarked/Non-Earmarked). Kinerja fiskal: Papua Barat tumbuh 4,73%, Papua Barat Daya 4,9%. Realisasi Dana Desa 2025 hanya 77,5% — terendah. Teridentifikasi isu: mismatch data kecamatan, keterlambatan verifikasi, nama desa tidak konsisten.



 10 Maret 2026

Audiensi

 Kantor BPP Lantai III, GKN Manokwari

TUJUAN KEGIATAN

Audiensi antara BP3OKP Papua Barat dengan Universitas Papua (UNIPA) dalam rangka penguatan kolaborasi pembangunan SDM dan implementasi program strategis Papua.

PESERTA KEGIATAN

- BP3OKP Perwakilan Papua Barat
- Perwakilan UNIPA (Universitas Papua)

HASIL KEGIATAN

Pertemuan membahas penguatan peran UNIPA sebagai Perguruan Tinggi Pembina bagi Akademi Komunitas di Papua Barat Daya, serta koordinasi teknis program SSH (Sekolah Sepanjang Hari) dan pengembangan kapasitas kelembagaan.



CAPAIAN

- Terbangunnya sinergi BP3OKP–UNIPA dalam pendampingan Akademi Komunitas
- Koordinasi lanjut program SSH & penjaminan mutu pendidikan vokasi Papua

11 Maret 2026

Webinar

Zoom Meeting (Online)

TUJUAN KEGIATAN

BP3OKP sebagai narasumber dalam Serial Webinar Refleksi 1 Tahun Percepatan Hutan Adat: membahas nilai ekonomi hutan adat dan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat di Tanah Papua.

PESERTA KEGIATAN

- Sulfianto Alias – Ketua Perkumpulan Panah Papua
- Arnol Halitopo – Panah Papua
- Vilta – Econusa (Program Ekonomi Restoratif)
- Irene Manibuy – Kepala BP3OKP Papua Barat
- Ismail Sirfeffa – Pokja POLHUKAM, BP3OKP
- Yustina Ogoney – Lembaga Pengelola Hutan Adat Marga Ogoney
- Perwakilan MRP & Dewan Wilayah Adat Papua

HASIL KEGIATAN

BP3OKP tekankan: (1) kolaborasi lintas sektor untuk visi bersama hutan adat; (2) regulasi daerah sebagai fondasi pengakuan; (3) Papua harus dapat porsi adil (bukan hanya 19.000 ha dari 1,4 juta ha nasional); (4) OAP sebagai pelaku aktif ekonomi hutan adat. Semua isu sudah terakomodasi dalam RIPP & RAPP.



CAPAIAN

- BP3OKP tegaskan posisi strategis terkait hak hutan adat Papua dalam RIPP
- Dorongan kepada Pemda untuk percepat regulasi pengakuan masyarakat adat
- Rekomendasi: target hutan adat Papua harus ditingkatkan proporsional

11 Maret 2026

Audiensi

GKN Lantai II, Manokwari

TUJUAN KEGIATAN

Memperkenalkan kepengurusan Mata Garuda Wilayah Papua Barat dan mendiskusikan peluang kolaborasi strategis dalam mendukung Misi Papua Cerdas: penguatan SDM, riset kebijakan, inovasi pembangunan, dan perluasan akses beasiswa OAP.

PESERTA KEGIATAN

- Kakanwil DJPb Papua Barat
- BP3OKP Perwakilan Papua Barat
- Pengurus Mata Garuda Wilayah Papua Barat (LPDP Alumni)

HASIL KEGIATAN

Perkenalan resmi kepengurusan Mata Garuda Papua Barat. Diskusi pemetaan peluang kolaborasi riset kebijakan pembangunan Papua, penguatan SDM unggul OAP, dan sinergi program beasiswa LPDP dengan Misi Papua Cerdas dalam RIPP.



CAPAIAN

- Terjalin komunikasi resmi Mata Garuda Papua Barat – BPP – DJPb
- Terpetakan peluang kolaborasi riset kebijakan & penguatan SDM OAP
- Rencana tindak lanjut kolaborasi dalam kerangka Papua Cerdas – RAPP

Makna Strategis

Kegiatan BPP Papua Barat Maret 2026

Melalui kegiatan di bulan Maret 2026, BP3OKP Papua Barat menunjukkan peran nyata sebagai koordinator dan fasilitator lintas sektor — mulai dari sinkronisasi infrastruktur, advokasi hak masyarakat adat, sinkronisasi Dana Desa, konsultasi perencanaan daerah, hingga penguatan SDM Papua.

Seluruh kegiatan bermuara pada percepatan implementasi RIPPP 2022–2041 dan RAPPP 2025–2029 demi terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Rekomendasi

Strategis

Tindak Lanjut Prioritas Berdasarkan Kegiatan Maret 2026

9 Rekomendasi dari 9 Kegiatan | BP3OKP Papua Barat

R1

Percepatan Infrastruktur Teluk Bintuni

Dari: Audiensi Bupati Teluk Bintuni (2 Mar 2026)

Tindaklanjuti hasil audiensi dengan menyusun proposal teknis bersama Balai PUPR untuk program jalan, perumahan, dan SPAM Bintuni. BPP Papua Barat mengkoordinasikan surat resmi kepada BBPJN, BP2P, dan BWS.

→ Susun surat permohonan teknis → Rapat lanjutan lintas Balai PUPR → Masukkan dalam RAPPP 2026.

R2

Penyelesaian Hak Kompensasi Gas Suku Sebiar (9 Sumur Belum Dibayar)

Dari: Rapat Koordinasi LPMS Suku Sebiar (3 Mar 2026)

Fasilitasi rapat koordinasi melibatkan Gubernur Papua Barat, ESDM, dan SKK Migas untuk menyelesaikan kompensasi 9 sumur yang belum dibayar dari total 15 sumur. Dorong dasar hukum formal pengganti Pergub No. 25/2023.

→ Koordinasi dengan Gubernur /Bupati Teluk Bintuni → Undang ESDM & SKK Migas → Dokumentasikan 27 masalah LPMS.

R3

Sinkronisasi RKPDP Papua Barat 2027 dengan RIPPP & RAPPP

Dari: Konsultasi Publik RKPDP Papua Barat 2027 (9 Mar 2026)

Memastikan program tiga pilar masuk dalam RKPDP 2027. Dorong konsistensi alokasi anggaran kesehatan minimum 20% APBD dan bangun SMK Negeri Pariwisata sebagai solusi pendidikan vokasi strategis daerah.

→ Review RKPDP 2027 oleh Pokja → Surat rekomendasi ke Gubernur & Bappeda → Kawal dalam pembahasan APBD 2027.

R4 Penguatan SDM OAP melalui Kolaborasi Mata Garuda & Program Beasiswa LPDP

Dari: Audiensi Kakanwil DJPb & Mata Garuda Papua Barat (11 Mar 2026)

Manfaatkan jaringan alumni LPDP (Mata Garuda Papua Barat) untuk riset kebijakan pembangunan dan advokasi perluasan kuota beasiswa OAP. Integrasikan dengan program Papua Cerdas dalam RAPPP.

→ Susun program kolaborasi riset BPP–Mata Garuda → Koordinasi LPDP untuk kuota beasiswa OAP

R7 Advokasi Porsi Hutan Adat Papua yang Berkeadilan ke Pemerintah Pusat

Dari: Webinar Refleksi 1 Tahun Percepatan Hutan Adat (11 Mar 2026)

Papua hanya mendapat 19.000 ha dari target nasional 1,4 juta ha. BPP advokasi peningkatan target proporsional dan dorong setiap Pemda kabupaten menyelesaikan regulasi pengakuan masyarakat adat (Perda/SK Bupati) sebagai prasyarat pengajuan hutan adat ke KLHK.

→ Susun posisi paper advokasi → Koordinasi 7 Dewan Wilayah Adat Papua → Sampaikan ke Wapres/KLHK dalam Forum SHEK berikutnya.

R9 Kawal Implementasi RAPPP 2025–2029 dengan Evaluasi Kuartalan

Dari: Rakor RAPPP Biak (5–7 Mar) & Konsultasi Publik RKPD (9 Mar 2026)

Dengan ditetapkannya RAPPP melalui Perpres 107/2025, BP3OKP harus memastikan seluruh program daerah (6 provinsi) terselaraskan. Lakukan evaluasi kuartalan penyerapan Dana Otsus dan identifikasi sumbatan lebih awal.

→ Tetapkan jadwal Forum SHEK evaluasi per kuartal → Buat dashboard monitoring RAPPP → Koordinasi rutin dengan Bappenas & DJPK.